



**LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI  
PADA MASA RESES PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2015 - 2016  
KE PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
1 s.d. 5 Mei 2016**

---

## **I. PENDAHULUAN**

Dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016, Komisi XI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan pada Tanggal 1 sampai dengan 5 Mei 2016. Sesuai dengan ruang lingkup tugasnya di bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional dan perbankan, Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah serta instansi-instansi Pemerintah Pusat dan mitra kerja Komisi XI DPR RI yang ada di daerah.

Sebagai informasi, bahwa Komisi XI DPR RI telah menetapkan target-target pembangunan dalam kesimpulan Rapat Kerja Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun Anggaran 2016. Target-target pembangunan tersebut merupakan acuan bagi Pemerintah dalam mengelola APBN bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Adapun target pembangunan yang telah disepakati adalah: Tingkat Pengangguran 5,2-5,5%, Tingkat Kemiskinan 9,0-10,0%, Gini Rasio 0,39 dan IPM 70,10.

Dalam APBN tahun 2016, Penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.546.664,6 miliar atau meningkat sebesar 3,9 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2015. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh perkiraan membaiknya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan didukung oleh kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan, peningkatan kapasitas organisasi, serta penyempurnaan berbagai peraturan termasuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Untuk mencapai target penerimaan perpajakan dalam APBN tahun 2016, Pemerintah akan menerapkan beberapa kebijakan di bidang perpajakan, selain itu juga Pemerintah akan mengambil beberapa langkah kebijakan yang bersifat teknis, seperti

penguatan dan perluasan basis data perpajakan, terkait dengan upaya optimalisasi penerimaan perpajakan, baik dari sisi pajak maupun kepabeanan dan cukai.

Dalam kunjungan kerja ini Komisi XI DPR RI bermaksud mendapatkan data dan informasi terkini guna mengetahui gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dan instansi-instansi Pemerintah Pusat yang ada di daerah serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kami juga ingin mendengar masukan dan input program kerja pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat kami teruskan dalam Rapat-rapat kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Selain hal-hal yang telah diuraikan diatas, Kami juga ingin mendapatkan informasi terkait dengan upaya pencapaian target serta optimalisasi yang sudah dan akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan agar target penerimaan perpajakan yang sudah ditetapkan dapat tercapai, serta permasalahan terkait Penagihan Piutang Negara, Pendapatan Negara Bukan Pajak, Realisasi Pengelolaan dan Penyerapan Anggaran di Kanwil Kementerian Keuangan, Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kanwil Kementerian Keuangan.

Susunan keanggotaan Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

No.	Nama Anggota	No. Angg	Fraksi	Keterangan
1.	Ir. H. Ahmadi Noor Supit	304	P.Golkar	Ketua Tim/ Ketua Komisi XI
2.	Ir. Muhammad Prakosa	183	PDI P	Wakil Ketua Komisi XI
3.	M.H. Said Abdullah	204	PDI P	Anggota
4.	Eva Kusuma Sundari	196	PDI P	Anggota
5.	H. Muhammad Nur Purnamasidi	285	P. Golkar	Anggota
6.	Drs. Agus Gumiwang Kartasasmita	254	P. Golkar	Anggota
7.	M. Sarmuji, SE., M. Si	287	P. Golkar	Anggota
8.	Heri Gunawan, SE	346	P. Gerindra	Anggota
9.	H. Rudi Hartono Bangun, SE., MAP	401	P. Demokrat	Anggota
10.	Muhammad Hatta	480	PAN	Anggota
11.	Hadi Zainal Abidin	68	PKB	Anggota

12.	Abdul Latief Hanafiah, M. Sc.	81	PKB	Anggota
13.	Hj. Kasriah	540	PPP	Anggota
14.	H. Donny Ahmad Munir, ST., MM	519	PPP	Anggota
15.	Donny Imam Priambodo, ST., MM	15	P. Nasdem	Anggota
16.	Ir. Nurdin Tampubolon	545	P. Hanura	Anggota

## II. INFORMASI DAN TEMUAN

### A. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1. Postur APBD Provinsi Kalimantan Selatan selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Secara umum APBD terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang ditutup dengan Silpa. Untuk Pemprov Kalsel dari tahun 2013 pada sisi pendapatan tingkat kemandirian fiskalnya cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah Pemprov Kalsel masih lebih besar dari pendapatan transfer (dana perimbangan), dimana pada tahun 2013 PAD nya sebesar 57,51%, tahun 2014 PAD nya sebesar 60,48% serta pada tahun 2015 sebesar 56,65%. Sedangkan untuk belanja masih didominasi oleh belanja operasional yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, belanja bantuan sosial serta belanja bantuan keuangan.

2. Alokasi penggunaan dan realisasi program yang dananya berasal dari dana selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Seluruh penerimaan yang berasal dari dana perimbangan digunakan untuk membiayai belanja pegawai serta program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemprov Kalsel. Terdapat sebagian dari dana perimbangan tersebut dan peruntukan kegiatannya sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat, seperti dana DAK.

3. Komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perkembangannya serta kontribusinya dalam APBD Prov. Kalsel selama 3 (tiga) tahun terakhir :

Komponen PAD Pemprov Kalsel terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan pertanggungjawaban APBD dari Tahun Anggaran (TA) 2013 sampai TA 2015 bahwa Pajak Daerah merupakan penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pajak daerah ini sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah serta terhadap APBD.

4. Evaluasi dan usulan perbaikan Dana Perimbangan dalam rangka penyusunan APBN, terutama dengan rencana revisi UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah :

Dalam rangka penyempurnaan kebijakan berkenaan dengan rencana revisi UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain adanya keberpihakan kepada Daerah, khusus kepada Daerah berpenghasil dalam penetapan proporsi Bagi Hasil atas penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) maupun Dana Transfer Daerah lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi hak Pemerintah Daerah.

Diharapkan dalam penetapan alokasi DBH maupun Dana transfer lainnya dapat menjadi pedoman definitif oleh Pemda untuk penetapan target penerimaan APBD. Ketidaksesuaian saat penetapan dan penyaluran DBH dan dana transfer daerah lainnya akan menyulitkan Pemda yang saat ini diharuskan menggunakan pengelolaan keuangan menjadi akrual basis.

5. Hasil Audit BPK terhadap laporan keuangan daerah Provinsi Kalsel dalam 3 (tiga) tahun terakhir :

Hasil Audit BPK terhadap Laporan Pemprov. Kalsel sejak Tahun Anggaran 2013 adalah Wajar Tanpa Pengecualian, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2015 masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK.

6. Penyerapan anggaran APBD Provinsi Kalsel selama 3 (tiga) terakhir :

Penyerapan anggaran APBD Prov. Kalsel masih berkisar antara 80-90% per tahun. Penumpukan di akhir tahun masih terjadi, hal ini disebabkan oleh proyek-proyek yang nilai kontraknya besar pengerjaannya biasanya diselesaikan pada bulan Desember sehingga proses penagihannya ke kas daerah terjadi pada akhir tahun anggaran.

7. Program pembinaan yang dilakukan oleh Pemprov Kalsel kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual :

Pada Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Selatan terdapat bagian Evaluasi Kabupaten/Kota yang bertugas melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota dan penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual.

## B. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1. Hasil temuan BPK Perwakilan Prov. Kalsel terkait Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara dan Keuangan Daerah Prov. Kalsel serta tindaklanjut hasil temuan tersebut (dalam 3 tahun terakhir) :

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK meliputi tiga jenis pemeriksaan, yakni:

- a. Pemeriksaan Keuangan; yang bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan dengan pemberian opini akan mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas LKPD. Hasil pemeriksaan Tahun 2015 terhadap Pemda yang memperoleh opini WTP sebanyak 10 entitas, dan yang memperoleh opini WDP sebanyak 4 entitas.

Permasalahan yang dihadapi oleh 4 entitas yang memperoleh Opini WDP adalah Penatausahaan Aset Tetap belum tertib dan penyajian saldo Aset Tetap belum dapat diyakini kewajarannya. BPK juga melakukan pemeriksaan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian selama 3 tahun terakhir antara lain pengelolaan aset, dan pendapatan serta belanja daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2013 s.d. 2015 atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemda/Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan IHPS II dapat dirinci sebagai berikut:

*dalam rupiah*

Tahun Pemeriksaan	Jml Pemeriksaan	Jml Temuan	Rekomendasi		Tindak Lanjut	
			Jml	Nilai	Sesuai Rekomendasi	Belum sesuai
2015	14	149	350	8.516.085.574,71	3.289.552.062,28	4.829.863.253,55
2014	14	194	486	58.038.856.432,26	5.735.312.921,30	52.016.204.510,96
2013	14	251	694	31.676.841.728,81	17.281.268.675,29	14.116.965.593,52
<b>Total</b>		<b>594</b>	<b>1530</b>	<b>98.231.783.735,78</b>	<b>26.306.133.658,87</b>	<b>70.963.033.358,03</b>

- b. Pemeriksaan Kinerja; bertujuan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis, efisien serta memenuhi sasaran secara efektif. Laporan hasil pemeriksaan kinerja memuat temuan, simpulan dan rekomendasi.

Pada Tahun 2013 hingga 2015 BPK telah melaksanakan Pemeriksaan Kinerja yaitu: Pemeriksaan PDAM, Kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Kinerja Pajak Hotel, Restoran dan Reklame, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP berbasis Akruar, Kinerja atas Pendataan dan Penagihan PBB P2 serta Efisiensi dan Efektivitas

Program Bank Kassel dalam rangka Peningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 dan semester I 2015, dengan rincian sebagai berikut:

*dalam rupiah*

Tahun Pemerik- saan	Jml Pemerik- saan	Jml Temuan	Rekomendasi		Tindak Lanjut	
			Jml	Nilai	Sesuai Rekomendasi	Belum sesuai
2015	6	46	165	0,00	0,00	0,00
2014	4	76	260	0,00	0,00	0,00
2013	5	120	315	372.911.528,00	291.375.011,00	81.536.517,00
<b>Total</b>		<b>242</b>	<b>740</b>	<b>372.911.528,00</b>	<b>291.375.011,00</b>	<b>81.536.517,00</b>

- c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT); yaitu Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.

PDTT yang dilakukan yaitu: Pemeriksaan Pengelolaan Aset, BUMD, Belanja Modal Infrastruktur, Pendapatan, dan Pengelolaan serta Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Tambahan Penghasilan guru. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang dimuat dalam IHPS II Tahun dapat dirinci sebagai berikut:

*dalam rupiah*

Tahun Pemerik- saan	Jumlah Pemerik- saan	Jml Temuan	Rekomendasi		Tindak Lanjut	
			Jml	Nilai	Sesuai Rekomendasi	Belum sesuai
2015	11	59	130	14.772.470.458,40	0,00	0,00
2014	6	33	79	15.986.184.240,84	12.057.101.864,37	2.966.719.419,77
2013	20	136	439	153.450.544.071,28	42.412.512.462,67	94.316.665.364,35
				USD3.451.674,97	USD0,00	USD3.451.674,97
<b>Total</b>		<b>228</b>	<b>648</b>	<b>184.209.198.770,52</b>	<b>54.469.614.327,04</b>	<b>97.283.384.784,12</b>
				<b>USD3.451.674,97</b>	<b>USD0,00</b>	<b>USD3.451.674,97</b>

Rincian pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berdasarkan entitas pemeriksaan adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI  
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN  
TAHUN 2013 S.D. 2015  
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut			
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	Prov. Kalsel	2015	43	129	691.085.227,32	5	-	37	-
		2014	23	71	7.208.758.297,58	44	6.762.927.958,09	27	445.830.339,49
		2013	57	164	1.468.491.211,00	100	986.517.667,00	63	206.313.544,00
									USD 197.125
2	Kota Banjarmasin	2015	28	58	2.856.818.439,67	8	134.365.544,02	6	-
		2014	10	15	168.900.763,00	5	123.648.863,00	10	45.251.900,00
		2013	80	204	2.068.868.483,90	107	1.707.723.716,90	86	361.144.767,00
3	Kab. Barito Kuala	2015	22	68	378.360.258,88	11	119.190.000,00	25	-
		2014	13	34	788.685.701,60	16	65.294.052,90	18	723.391.648,70
		2013	25	67	14.518.854.176,29	55	10.769.435.799,58	11	3.147.654.424,51
4	Kota Banjarbaru	2015	32	76	491.811.196,96	13	-	24	306.597.241,96
		2014	23	80	1.735.705.019,29	12	259.016.786,67	63	226.986.275,92
		2013	23	68	3.948.212.465,33	35	1.426.505.231,45	33	2.521.707.233,88
5	Kab. Banjar	2015	15	39	2.684.710.378,46	9	88.408.642,00	8	-
		2014	40	80	236.559.618,73	61	236.559.618,73	8	-
		2013	33	122	44.536.904.929,83	100	12.517.736.816,98	19	32.019.168.112,85
									USD3.254.549,97
6	Kab. Tapin	2015	15	42	-	12	-	2	-
		2014	13	29	5.638.089.033,50	28	5.638.089.033,50	1	-
		2013	31	91	1.972.946.640,94	72	1.883.262.509,44	10	89.684.131,50
7	Kab. HSS	2015	8	19	-	18	-	1	-
		2014	38	104	148.688.378,00	61	148.688.378,00	13	-
		2013	20	54	1.526.167.172,21	53	1.526.167.172,21	1	-
8	Kab. Tanah Laut	2015	12	20	2.836.736.047,80	9	46.606.480,02	5	-
		2014	30	104	1.213.772.607,38	48	647.985.098,25	55	565.787.509,13

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut			
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai
		2013	38	87	989.622.048,63	44	428.128.439,48	37	561.493.609,15
9	Kab. Tanah Bumbu	2015	14	22	2.496.277.037,18	13	228.697.547,53	4	21.440.775,43
		2014	13	33	75.821.400,00	26	75.821.400,00	6	-
		2013	44	119	49.802.895.810,55	83	10.363.979.118,21	27	39.438.916.692,34
10	Kab. Kotabaru	2015	18	31	9.215.116.716,46	1	1.889.598.753,00	20	3.784.369.601,49
		2014	20	51	49.822.305.427,32	20	229.000.000,00	10	49.593.305.427,32
		2013	24	104	44.469.252.351,14	12	5.822.396.853,62	38	22.524.305.745,46
11	Kab. HST	2015	9	20	632.156.058,82	8	265.099.500,00	12	367.056.558,82
		2014	19	77	536.497.010,00	33	337.358.477,00	44	199.138.533,00
		2013	25	57	4.136.423.285,43	51	2.938.279.367,98	6	1.198.143.917,45
12	Kab. HSU	2015	17	68	160.348.000,00	17	6.900.000,00	27	153.448.000,00
		2014	25	67	2.482.721.136,19	53	1.933.856.683,53	14	548.864.452,66
		2013	52	162	974.471.517,11	64	558.931.747,11	92	415.539.770,00
13	Kab. Balangan	2015	8	19	137.500.000,00	4	-	9	-
		2014	12	26	117.176.140,00	22	117.176.140,00	3	-
		2013	18	42	143.318.237,00	34	143.318.237,00	8	-
14	Kab. Tabalong	2015	13	34	707.636.671,56	1	205.307.510,71	33	502.329.160,85
		2014	24	54	3.851.360.140,51	26	1.216.992.296,00	23	2.634.367.844,51
		2013	37	107	14.943.868.998,73	50	8.912.773.472,00	44	6.031.095.526,73

2. Hasil audit/pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap pembangunan di daerah dan pengawasan yang dilakukan terhadap pegawai BPK yang melakukan audit/pemeriksaan:

Pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap pembangunan di daerah adalah Pemeriksaan belanja modal infrastuktur, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang, kelebihan pembayaran
- Pemahalan harga atas pengadaan paket pekerjaan



- Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, Ketidaksiesuaian pekerjaan dengan kontrak, Denda keterlambatan belum dipungut
- Pengadaan langsung paket pekerjaan menyimpang dari ketentuan
- Penyusunan HPS belum sesuai ketentuan dan belum dilengkapi dengan kertas kerja yang memadai
- Hasil pengadaan barang belum dimanfaatkan
- Prestasi fisik pembangunan belum didukung *back up* data perhitungan volume
- Terdapat addendum pengadaan tidak sesuai ketentuan

Rincian hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Pembangunan di Daerah adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI**  
**Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terhadap**  
**Pembangunan di Daerah**  
**Tahun 2013 s.d. 2015**

Jenis Pemeriksaan	Tahun	Judul Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Nilai Temuan	Jumlah rekomendasi	Nilai Rekomendasi	Tindak Lanjut		
							Selesai rekomendasi	Belum Sesuai	
PDDT	2013	1	Pemeriksaan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA 2012 dan TA 2013	8	16.929.882.250,97	22	13.885.338.250,97	10.138.867.334,26	3.147.654.424,51
		2	Pemeriksaan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan TA 2012 dan TA 2013	6	1.400.163.999,78	22	1.400.163.999,78	1.400.164.000,07	-
		3	Pemeriksaan atas Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah TA 2012 dan TA 2013	4	4.036.060.581,17	16	3.725.629.378,61	2.527.485.461,16	1.198.143.917,45
		4	Pemeriksaan atas Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu TA 2012 dan TA 2013	8	6.181.924.206,62	24	5.463.290.736,55	4.935.936.247,21	428.933.998,34
		5	Pemeriksaan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Banjarbaru TA 2012 dan TA 2013	4	1.459.449.129,12	12	1.458.190.865,39	1.159.877.359,16	298.313.506,23
Total 2013 (A)			30	30.007.480.167,66	96	25.932.613.231,30	20.162.330.401,86	5.073.045.846,53	
	2014	1	Pemeriksaan atas Belanja Modal Infrastruktur TA 2013 s.d. Triwulan III TA 2014 pada Pemerintah	5	5.288.045.892,07	7	5.150.329.692,07	5.150.329.692,00	-

			Provinsi Kalimantan Selatan						
		2	Pemeriksaan atas Belanja Modal Infrastruktur TA 2013 s.d. Triwulan III TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Tapin	3	9.870.544.054,25	5	5.057.912.633,50	5.057.912.633,50	-
		3	Pemeriksaan atas Belanja Modal Infrastruktur TA 2013 s.d. Triwulan III TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Tabalong	6	3.688.872.379,04	9	3.014.323.670,04	417.897.877,00	2.596.425.793,04
		4	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Modal Infrastruktur TA 2013 s.d. Triwulan III TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	3	1.511.338.072,26	9	1.502.711.019,53	1.296.962.892,80	205.748.126,73
Total 2014 (B)				17	20.358.800.397,62	30	14.725.277.015,14	11.923.103.095,30	2.802.173.919,77
2015		1	Pemeriksaan atas Belanja Modal Infrastruktur TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	9	5.933.602.414,52	20	691.085.227,32	-	691.085.227,32
		2	Pemeriksaan Belanja Modal Infrastruktur dan Pengadaan Tanah TA 2014 dan 2015 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kota Banjarmasin	6	3.563.436.504,00	13	2.672.940.095,65	-	2.672.940.095,65
		3	Pemeriksaan atas Belanja Infrastruktur TA 2014 dan 2015 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Banjar	3	2.321.850.296,46	7	2.321.850.296,46	-	2.321.850.296,46
		4	Pemeriksaan atas Belanja Modal Infrastruktur TA 2014 dan 2015 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	3	2.790.129.567,78	6	2.790.129.567,78	-	2.790.129.567,78
		5	Pemeriksaan atas Belanja Modal Infrastruktur TA 2014 dan 2015 (s.d Triwulan III) pada	2	2.377.305.826,51	5	2.246.138.714,22	-	2.246.138.714,22

			Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu						
		6	Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2014 dan 2015 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru	6	3.541.148.360,97	10	3.541.148.361,97	-	3.541.148.361,97
Total 2015 (C)				29	20.527.472.970,24	61	14.263.292.263,40	-	14.263.292.263,40
Total (A+B+C)		15		76	70.893.753.535,52	187	54.921.182.509,84	32.085.433.497,16	22.138.512.029,70

Instrumen Pengawasan yang dilakukan terhadap pegawai BPK yang melakukan audit/pemeriksaan antara lain:

- Pengarahan Kepala Perwakilan Terkait Nilai dasar Pemeriksaan.
- Pemeriksaan harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), berbagai Juklak, Juknis dan Pedoman Pemeriksaan serta mengacu pada Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP).
- Penerapan penjaminan mutu melalui mekanisme *Quality Control* dan *Quality Assurance* yang dilaksanakan pada setiap tahap pemeriksaan (perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan).
- BPK Kalsel melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang melibatkan seluruh aparatur BPK Kalsel termasuk pelaksana pemeriksaan (auditor).

3. Langkah dan pembinaan yang sudah dilakukan oleh perwakilan BPK Kalsel dalam memperbaiki kinerja laporan keuangan daerah baik Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota:

- a. Kegiatan Pemeriksaan, meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, sesuai dengan RKP (Rencana Kegiatan Pemeriksaan), yang ditujukan untuk memenuhi tuntutan konstitusional (mandatory – seperti LKPD, Pemeriksaan atas Dana Bantuan Parpol) dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- b. Pemantauan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian Negara/daerah yang dilakukan tiap semester.
- c. Koordinasi dengan APIP (Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah) BPKP Perwakilan Provinsi Kalsel dan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.

d. Sosialisasi dan monitoring *action plan* Pemerintah daerah dalam rangka meraih opini WTP.

4. Upaya dan usaha yang dilakukan oleh BPK Prov. Kalsel dalam melakukan *empowering* terhadap pegawai Pemprov Kalsel agar penyajian laporan keuangan daerah menjadi lebih baik, antara lain :

- Pembahasan *action plan*
- Sosialisasi kebijakan dan penerapan standar akuntansi
- *Focus Group Discussion* penerapan aplikasi SIMDA dengan melibatkan aparatur pengelola keuangan Pemerintah daerah, Inspektorat dan BPKP.

Perkembangan opini 3 tahun terakhir yang diberikan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

No	Entitas LKPD	OPINI LKPD		
		TA 2012	TA 2013	TA 2014
1	Prov. Kalsel	WDP	WTP	WTP
2	Kota Banjarmasin	WDP	WTP	WTP
3	Kab. Barito Kuala	WDP	WDP	WDP
4	Kota Banjarbaru	WDP	WDP	WDP
5	Kab. Banjar	WDP	WTP	WTP
6	Kab. Tapin	WDP	WDP	WTP
7	Kab. Hulu Sungai Selatan	WDP	WTP	WTP
8	Kab. Tanah Laut	WDP	WTP	WTP
9	Kab. Tanah Bumbu	WDP	WTP	WTP
10	Kab. Kotabaru	TW	WDP	WDP
11	Kab. Balangan	WDP	WTP	WTP
12	Kab. Hulu Sungai Tengah	WDP	WTP	WTP
13	Kab. Hulu Sungai Utara	WDP	WDP	WDP
14	Kab. Tabalong	WDP	WDP	WTP

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pemda yang memperoleh opini WTP pada TA 2013 sebanyak 8 Entitas dan pada TA 2014 sebanyak 10 Entitas. Adapun penilaian opini BPK, pengecualian terhadap 4 entitas dalam memperoleh Opini WTP adalah Penatausahaan Aset Tetap belum tertib dan penyajian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 belum dapat diyakini kewajarannya.

5. Saran-saran dan pandangan yang ingin disampaikan Kantor Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Selatan kepada Komisi XI DPR RI sebagai masukan perbaikan kinerja dan pengawasan mendatang :

Saran dan masukan:

- Sesuai dengan Pasal 98 Ayat (3) huruf b dan c Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah

ditetapkan kewenangan komisi dalam hubungannya dengan BPK. Agar pola hubungannya jelas, maka sebaiknya dibuat mekanisme kerja antara DPR RI dengan instansi di daerah, seperti DPRD dalam menindaklanjuti LHP BPK, telah ditetapkan Permendagri nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan fungsi Pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

- Perlu disusun peraturan perundang-undangan terkait BUMD mengingat UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perbaharuan.
- Dengan semakin meningkatnya kewenangan daerah dan pelimpahan dana-dana pusat ke daerah dari APBN baik melalui APBD maupun non APBD, perlu dilakukan sinkronisasi regulasi peraturan perundang-undangan, terutama dikaitkan dengan penerapan penatausahaan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual, antara lain menyangkut Dana Desa, Dana BOS dan Hibah dari Pusat yang dilaksanakan oleh Kementerian terkait kepada Daerah.

Provinsi Kalimantan memiliki 11 Kabupaten dengan total 1867 desa yang mendapatkan penyaluran Dana Desa dari Pusat (APBN) melalui APBD yang disalurkan langsung ke rekening desa. Terdapat indikasi permasalahan yang dihadapi pada pengelolaan dana desa tersebut, antara lain:

- a. Lemahnya perencanaan penggunaan Dana Desa.
- b. Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum tertib dan tidak tepat waktu.
- c. Kurangnya tingkat pemahaman SDM untuk mengelola Dana Desa sesuai dengan ketentuan.
- d. Lemahnya pengendalian pihak Pemerintah Daerah c.q Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Kecamatan dalam melakukan monitoring pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa.
- e. Terdapat penyaluran yang melebihi anggaran yang disebabkan oleh kekurangan kecermatan PPK pada BPMPD dalam menangani penyaluran dana desa.
- f. Perlu dilakukan koordinasi antara Kementerian terkait (Kemendagri, Kemendes, dan Kemenkeu) serta aparat pelaksana dilapangan agar program penyaluran dana desa dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

### C. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

1. Informasi terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah agar pemanfaatan anggaran dapat berlangsung tepat guna :

Beberapa kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh BPKP, antara lain:

- a. BPKP memberikan masukan pada saat musrenbangda agar pelaksanaan anggaran berjalan tepat guna dan mendorong penyusunan serta pengajuan RAPBD tepat waktu.
- b. BPKP melakukan bimtek peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), diantaranya pendampingan perumusan indikator kinerja pemerintah daerah dalam dokumen perencanaan.

Berikut ini adalah hasil penilaian Kementerian PAN dan RB atas LKIP di lingkungan pemerintah daerah di Kalsel:

**Nilai AKIP untuk Seluruh Pemda di Provinsi Kalimantan Selatan  
Tahun 2013-2014**

No.	Nama Pemprov/Pemda	HASIL EVALUASI AKIP	
		2013	2014
1.	Prov. Kalimantan Selatan	Baik	Sangat Baik
2.	Kota Banjarmasin	Cukup Baik	Cukup
3.	Kota Banjarbaru	Cukup Baik	Cukup
4.	Kab. Banjar	Cukup Baik	Cukup
5.	Kab. Tanah Laut	Cukup Baik	Cukup
6.	Kab. Barito Kuala	Agak Kurang	Kurang
7.	Kab. Tapin	Cukup Baik	Kurang
8.	Kab. Hulu Sungai Selatan	Cukup Baik	Cukup
9.	Kab. Hulu Sungai Tengah	Cukup Baik	Cukup
10.	Kab. Hulu Sungai Utara	Cukup Baik	Cukup
11.	Kab. Balangan	Cukup Baik	Cukup
12.	Kab. Tabalong	Agak Kurang	Kurang
13.	Kab. Tanah Bumbu	Cukup Baik	Cukup
14.	Kab. Kotabaru	Agak Kurang	Kurang

Hal-hal yang perlu dilakukan Pemda untuk meningkatkan kualitas AKIP:

- Proses penyusunan RPJMD dan renstra melibatkan semua komponen terkait
- Melakukan *review* atas komponen renstra oleh pimpinan unit kerja
- Dokumentasi atas seluruh hasil *review*
- Membuat SOP dan pengaturan tentang pengelolaan data dan pelaporan kinerja

- Membentuk tim lintas SKPD untuk melakukan reviu skala prioritas dan kegiatan serta dokumentasi
- c. Selain LKIP, kualitas akuntabilitas kinerja Pemda juga ditunjukkan dari nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Gambaran hasil evaluasi (EKPPD) di Provinsi Kalsel adalah sebagai berikut:

**Data Hasil EKPPD  
Seluruh Pemda di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2014**

No.	Nama Pemprov/Pemda	HASIL EKPPD	
		2013	2014
1.	Prov. Kalimantan Selatan	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.	Kota Banjarmasin	Tinggi	Tinggi
3.	Kota Banjarbaru	Tinggi	Tinggi
4.	Kab. Banjar	Tinggi	Sangat Tinggi
5.	Kab. Tanah Laut	Tinggi	Tinggi
6.	Kab. Barito Kuala	Tinggi	Sangat Tinggi
7.	Kab. Tapin	Tinggi	Tinggi
8.	Kab. Hulu Sungai Selatan	Tinggi	Tinggi
9.	Kab. Hulu Sungai Tengah	Tinggi	Tinggi
10.	Kab. Hulu Sungai Utara	Sangat Tinggi	Tinggi
11.	Kab. Balangan	Tinggi	Tinggi
12.	Kab. Tabalong	Tinggi	Tinggi
13.	Kab. Tanah Bumbu	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
14.	Kab. Kotabaru	Tinggi	Tinggi

Langkah-langkah untuk meningkatkan/mempertahankan nilai LPPD:

- Membuat rencana tidak pengendalian (RTP) untuk memperbaiki kelemahan
  - Menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antara Bagian Tata Pemerintahan dengan seluruh SKPD
  - Membuat SOP pengumpulan data kinerja untuk berbagai keperluan pelaporan
  - Mengelola dokumen secara tertib dan rapi
- d. BPKP melakukan audit kinerja pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan, antara lain memberikan saran pengalokasian anggaran sektor pendidikan minimal 20% dan sektor kesehatan minimal 10% serta pencantuman indikator standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan dan kesehatan dalam dokumen perencanaan.
- e. BPKP bersama dengan Inspektorat melakukan reviu Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dengan menggunakan aplikasi berbasis web. Data PBJ sampai dengan akhir Triwulan I TA 2016 adalah sebagai berikut:

**Data Pelaksanaan PBJ  
Seluruh Pemda di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan  
s.d. Triwulan I 2016**

No.	Nama Pemprov/Pemda	TARGET PBJ 2016		SUDAH TANDATANGAN KONTRAK	
		Jumlah Paket	Nilai (Milyar)	Jumlah Paket	Nilai (Milyar)
1.	Prov. Kalimantan Selatan	169	1.299,3	48	994,8
2.	Kota Banjarmasin	179	285,5	17	71,0
3.	Kota Banjarbaru	191	360,7	5	21,2
4.	Kab. Banjar	177	233,5	10	108,8
5.	Kab. Tanah Laut	176	399,0	2	4,8
6.	Kab. Barito Kuala	466	332,5	19	174,3
7.	Kab. Tapin	471	593,3	4	10,0
8.	Kab. Hulu Sungai Selatan	190	371,2	31	36,1
9.	Kab. Hulu Sungai Tengah	266	400,4	37	27,0
10.	Kab.Hulu Sungai Utara	166	320,3	1	1,6
11.	Kab. Balangan	163	252,8	9	32,7
12.	Kab. Tabalong	157	271,6	18	9,8
13.	Kab. Tanah Bumbu	188	322,5	17	74,6
14.	Kab. Kotabaru	399	525,4	0	0,0

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel dalam posisi tercepat dan tertinggi dalam pelaksanaan PBJ (2,37% dari jumlah paket dan 76,56% dari jumlah rupiah).

- f. BPKP bersama dengan Inspektorat melakukan *review* penyerapan anggaran secara triwulan dengan menggunakan aplikasi berbasis web. Hasil *review* menunjukkan rata-rata seluruh Pemda adalah 25,66%. Berikut ini gambaran penyerapan anggaran sampai dengan akhir Maret 2016 untuk seluruh Pemda:

**Data Penyerapan Anggaran  
Seluruh Pemda di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan  
s.d. Triwulan I 2016**

No.	Nama Pemprov/Pemda	Penyerapan s.d. Akhir Triwulan I 2016
1.	Prov. Kalimantan Selatan	64.77%
2.	Kota Banjarmasin	41.28%
3.	Kota Banjarbaru	15.12%
4.	Kab. Banjar	25.48%
5.	Kab. Tanah Laut	12.57%
6.	Kab. Barito Kuala	44.36%
7.	Kab. Tapin	23.96%
8.	Kab. Hulu Sungai Selatan	16.97%
9.	Kab. Hulu Sungai Tengah	15.61%



No.	Nama Pemprov/Pemda	Penyerapan s.d. Akhir Triwulan I 2016
10.	Kab.Hulu Sungai Utara	29.42%
11.	Kab. Balangan	17.03%
12.	Kab. Tabalong	24.05%
13.	Kab. Tanah Bumbu	0.00%
14.	Kab. Kotabaru	28.62%

g. BPKP melakukan pendampingan/ *review* terhadap PBJ pada proyek strategis nasional dan kegiatan strategis lainnya yang menjadi perhatian publik, antara lain:

- Pemeriksaan pemenuhan kewajiban PNBPN tambang batubara (2011-2013), penggunaan kawasan hutan (2015) dan terminal khusus, berhasil mengidentifikasi potensi penerimaan Negara senilai total Rp51,57 milyar.
- BPKP berhasil memediasi permasalahan pembangunan/pengembangan bandara Syamsudin Noor, yang intinya Pemkot Banjarbaru bersedia menyerahkan aset kepada PT Angkasa Pura I, dengan kompensasi aset dengan nilai yang sama.

2. Program pendampingan dan pembinaan yang dilakukan BPKP terhadap Pemda dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Permendagri 64/2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- b. Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan-SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SIMDA untuk menghasilkan laporan secara cepat dan akurat yang terdiri dari:
  - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
  - Neraca
  - Laporan Arus Kas (LAK)
  - Laporan Operasional (LO)
  - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
  - Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

- c. Pendampingan pembenahan aset daerah melalui kegiatan inventarisasi, pengklasifikasian, dan penatausahaan dengan menggunakan aplikasi SIMDA BMD yang dibuat oleh BPKP.

Berikut gambaran kualitas LKPD sebagaimana ditunjukkan dari perkembangan opini hasil pemeriksaan BPK RI:

**Perkembangan Opini BPK atas LKPD per Pemda  
di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan  
Tahun 2012 - 2014**

No.	Nama Pemprov/Pemda	Opini BPK		
		2012	2013	2014
1.	Prov. Kalimantan Selatan	WDP	WTP	WTP
2.	Kota Banjarmasin	WDP	WTP	WTP
3.	Kota Banjarbaru	WDP	WDP	WDP
4.	Kab. Banjar	WDP	WTP	WTP
5.	Kab. Tanah Laut	WDP	WTP	WTP
6.	Kab. Barito Kuala	WDP	WDP	WDP
7.	Kab. Tapin	WDP	WDP	WTP
8.	Kab. Hulu Sungai Selatan	WDP	WTP	WTP
9.	Kab. Hulu Sungai Tengah	WDP	WTP	WTP
10.	Kab. Hulu Sungai Utara	WDP	WDP	WDP
11.	Kab. Balangan	WDP	WTP	WTP
12.	Kab. Tabalong	WDP	WDP	WTP
13.	Kab. Tanah Bumbu	WDP	WTP	WTP
14.	Kab. Kotabaru	TW	WDP	WDP

Tabel di atas menunjukkan bahwa opini BPK atas LKPD meningkat dua tahun terakhir, dimana hanya 8 Pemda yang meraih WTP pada tahun 2013, menjadi 10 Pemda yang meraih WTP, dan diharapkan pada tahun 2015 seluruh Pemda dapat meraih opini WTP.

3. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh BPKP melakukan strategi pengawasan melalui strategi *preemptif*, *preventif* dan *represif* di Prov. Kalsel :

- a. Kegiatan *preemptif*:

BPKP melakukan kegiatan edukasi/pembelajaran melalui kegiatan sosialisasi kepada berbagai *focused group*,

- b. Kegiatan *preventif*:

BPKP melakukan penguatan sistem pengendalian intern, antara lain melalui penerapan/penyelenggaraan SPIP, penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Keuangan, SIMDA BMD, SIMDA Pendapatan, Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM HP), Evaluasi dan implementasi *Fraud Control Plan* (FCP), penerapan *Good Corporate*

*Governance* (GCG) pada BUMN/D, penerapan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) BLUD pada RSUD dan Puskesmas.

c. Kegiatan *represif*:

BPKP bekerjasama dengan aparat penegak hukum (POLRI dan Kejaksaan) untuk menuntaskan kasus dan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) berupa audit investigatif, audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di depan persidangan Tipikor.

➔ **Hambatan :**

Cakupan kegiatan tersebut terbatas pada target-target yang telah ditetapkan oleh BPKP Pusat sesuai dengan prioritas dan anggaran.

➔ **Efektivitas Strategi :**

Implementasi strategi tersebut secara simultan cukup efektif dalam menanggulangi korupsi dan memperbaiki tata kelola keuangan secara berkesinambungan, terbukti dari kasus yang ditangani jika dilihat dari jumlah kerugian menunjukkan penurunan, ditunjukkan dengan fakta sebagai berikut:

- 2014: 29 kasus dengan jumlah kerugian negara Rp32,97 milyar
- 2015: 28 kasus dengan jumlah kerugian negara Rp25,95 milyar
- 2016 sampai dengan April: 6 kasus dengan jumlah kerugian Negara sebesar Rp6 milyar
- Prov. Kalsel pada tahun 2014, termasuk Provinsi yang terbersih nomor 11

4. a. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh BPKP agar pengelolaan dana desa dapat berjalan secara transparan dan akuntabel antara lain:

- Regulasi

BPKP aktif memberikan masukan dalam penyusunan berbagai peraturan, melalui BPKP Pusat.

- Sistem

Menyusun Pedoman Bimbingan dan Konsultasi (Bimkon) Pengelolaan Keuangan Desa & membuat Aplikasi Keuangan Sederhana (SISKEUDES) yang diberikan secara gratis kepada Pemkab.

Untuk lingkup Provinsi Kalsel, telah dilakukan *workshop* SSIKEUDES kepada seluruh aparat BPMPD kabupaten pada tanggal 8 September 2015 di kantor BPKP. Selanjutnya pada tanggal 18-22 April 2016 diselenggarakan diklat implementasi SISKEUDES dengan peserta seluruh

Pemda di Kalsel. Sampai dengan saat ini, BPKP telah memberikan bimtek/pelatihan SISKEUDES secara langsung kepada aparat desa pada 6 (enam) kabupaten, yaitu Kabupaten Balangan, Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah.

- Peningkatan SDM
- Menjadi narasumber dalam rakor bulanan fasilitator (tenaga ahli) desa, bekerjasama dengan BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bimbingan dan Konsultasi
- BPKP memberikan bimbingan dan konsultasi kepada BPMPD, Inspektorat, Pemdes, dan fasilitator (tenaga ahli) desa, serta melakukan upaya penyebarluasan pemahaman pengelolaan keuangan desa melalui siaran langsung di RRI Banjarmasin dan penulisan makalah tentang keuangan desa pada surat kabar harian "Banjarmasin Post".
- BPKP melakukan monitoring penyaluran dan penggunaan dana desa oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa tahun 2015.

b. Kendala - kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa:

- Kurangnya kapasitas aparat kecamatan dan aparat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa dan teknologi informasi.
- Kondisi geografis lokasi desa yang jauh dari ibukota kabupaten.
- Peran kecamatan dan BPMPD kabupaten yang belum optimal dalam memfasilitasi pemerintah desa untuk berakuntabilitas.

5. Sinergi antara BPKP dan Inspektorat untuk menindaklanjuti temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI :

BPKP selalu melakukan koordinasi dan sinergi (korsin) dengan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan yang dilakukan secara triwulanan melalui kegiatan rakor. Secara simultan, BPKP selaku pembina teknis APIP, terus berupaya meningkatkan kapabilitas APIP melalui berbagai upaya antara lain: validasi atas *self assessment*, bimtek peningkatan, dan *reassessment* kapabilitas APIP.

Rata-rata level APIP pada tahun 2014 berada pada level 1, meskipun ada 3 Pemda berada di level 2 (dengan perbaikan), sedangkan pada tahun 2015 menunjukkan peningkatan. BPKP belum melakukan asesmen untuk keseluruhan Pemda, hal ini disebabkan karena target yang ditentukan oleh BPKP Pusat hanya 20% dari total Pemda di setiap Provinsi.

6. Saran dan pandangan dari kantor perwakilan BPKP Kalsel yang akan disampaikan kepada Komisi XI DPR RI demi perbaikan kinerja dan pengawasan mendatang :
  - a. Pemda saat ini terlalu dibebani dengan pelaporan keuangan dan kinerja yang banyak dan cenderung tumpang tindih.
  - b. BPKP mengusulkan anggaran untuk BPKP secara nasional agar dapat ditambah sekitar Rp 200 Milyar untuk lebih meningkatkan kualitas pengawasan.

#### D. BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1. Data perkembangan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan terkait angka kemiskinan, tingkat pengangguran, ketimpangan pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia:

- a. Tabel Series Persentase Penduduk Prov. Kalsel Menurut Klasifikasi Daerah Dan Status Kemiskinan:

Seri Waktu	Klasifikasi Wilayah	TM	SM	M	HM	RML
Maret 2011	Perkotaan	73,90	0,89	2,95	4,61	17,64
	Perdesaan	68,07	2,19	4,15	9,12	16,47
	Kota+Desa	70,52	1,64	3,65	7,22	16,96
Sep-11	Perkotaan	79,13	1,24	2,59	5,37	11,67
	Perdesaan	68,56	1,34	5,11	9,82	15,18
	Kota+Desa	73,01	1,29	4,05	7,95	13,70
Maret 2012	Perkotaan	73,38	0,84	2,83	4,89	18,05
	Perdesaan	64,64	1,52	4,55	8,92	20,36
	Kota+Desa	68,33	11,23	3,83	7,22	19,39
Sep-12	Perkotaan	82,68	0,87	2,70	4,75	9,01
	Perdesaan	60,76	1,69	4,37	11,54	21,64
	Kota+Desa	69,98	1,35	3,67	8,68	16,33
Maret 2013	Perkotaan	79,55	0,34	2,90	3,85	13,35
	Perdesaan	67,10	1,19	4,69	7,97	19,05
	Kota+Desa	72,34	0,83	3,94	6,24	16,65
Sep-13	Perkotaan	76,75	0,96	2,79	5,42	14,07
	Perdesaan	66,99	1,29	4,21	6,38	21,14
	Kota+Desa	71,11	1,15	3,61	5,98	18,15
Maret 2014	Perkotaan	79,63	1,44	2,35	4,26	12,32
	Perdesaan	64,92	1,05	4,28	9,43	20,32
	Kota+Desa	71,13	1,22	3,47	7,25	16,94
Sep-14	Perkotaan	74,88	0,72	2,96	3,59	17,85
	Perdesaan	67,12	1,58	4,06	6,61	20,64
	Kota+Desa	70,40	1,22	3,59	5,33	19,46

Keterangan :

TM = Tidak Miskin

SM = Sangat Miskin

M = Miskin

HM = Hampir Miskin

RML = Rentan Miskin lainnya

- b. Tingkat Pengangguran

Kegiatan Utama	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Feb 2011	71.07	5.48
Feb 2012	71.53	4.25
Feb 2013	72.20	3.84
Feb 2014	72.95	4.03
Feb 2015	73.21	4.83

- c. Ketimpangan Pendapatan

TAHUN	Gini Rasio
2011	0,36
2012	0,36
2013	0,34
2014	0,33
2015	0,33

- c. Indeks Pembangunan Manusia

Komponen	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup (tahun)	67.11	67.35	67.47
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11.54	11.67	11.96
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7.48	7.59	7.60
Paritas Daya Beli perkapita (juta Rp.)	10,553	10,655	10,748
IPM	66.68	67.17	67.63

2. Perkembangan tingkat kemiskinan (miskin dan hampir miskin) di Prov. Kalsel selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Persentase penduduk miskin di Kalsel selama tiga tahun terakhir (2012-2014) cenderung menurun. Angka kemiskinan di Kalsel relatif rendah jika dibandingkan dengan kemiskinan nasional, yaitu sebesar 3,67 % (pada bulan September 2012), kemudian pada bulan September 2013 tercatat sebesar 3,61 % dan September 2014 tercatat sebesar 3,59 %, menduduki peringkat nomor 3 terendah setelah DKI Jakarta dan Provinsi Bali.

Perkembangan penduduk hampir miskin di Kalsel juga cenderung menurun. Pada bulan September 2012, persentase penduduk hampir miskin di Kalsel tercatat sebanyak 8,68 %, pada bulan September 2013 sebanyak 5,98% dan pada bulan September 2014 tercatat sebanyak 5,33 %.

3. Inflasi di Provinsi Kalsel selama 3 (tiga) tahun terakhir, Komoditas Pendorong inflasi dan faktor penyebab di setiap Kabupaten memiliki kesamaan :

Pencatatan inflasi untuk Prov. Kalsel dilakukan di 2 (dua) kota, yaitu Kota Banjarmasin dan Kota Tanjung. Selama periode tahun 2014-2016 inflasi di dua kota tersebut secara umum berada di atas angka nasional.

Beberapa komoditi yang sering menjadi penyebab inflasi di kota Banjarmasin dan Kota Tanjung yaitu komoditi dalam kelompok bahan makanan, terutama ikan dan sayuran. Hal ini disebabkan karena *supply* komoditi tersebut masih tergantung dari kota di Pulau Jawa. Perkembangan inflasi tahun 2014-2016 terlihat pada tabel di bawah ini:

No	Kelompok Pengeluaran	2014		2015		2016	
		BJM (3)	TJG (4)	BJM (5)	TJG (6)	BJM (7)	TJG (8)
(1)	(2)						
	UMUM	7.16	8.8	5.03	6.69	0.81	-0.3
1	BAHAN MAKANAN	10.13	14.78	4.11	9.58	0.79	-1.56
2	MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK, DAN TEMBAKAU	8.65	5.83	8.42	14.75	2.46	0.34
3	PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS, DAN BAHAN BAKAR	5.15	7.14	4.53	1.15	-0.16	0.69
4	SANDANG	-0.42	2.64	6.29	7.47	2.3	0.58
5	KESEHATAN	9.76	8.53	12.65	3.41	0.96	0.39
6	PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA	4.09	6.19	3.17	10.97	1.52	-0.2
7	TRANSPORT, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	7.52	10.14	-0.15	-4.53	-1.26	-1.32

**KOTA BANJARMASIN  
PENDORONG DAN PENAHAN INFLASI SELAMA BULAN MARET 2016**

PENDORONG INFLASI				PENAHAN INFLASI			
	Komoditas	% Perubahan Harga	Andil		Komoditas	% Perubahan Harga	Andil
1	ANGKUTAN UDARA	4.46	0.0788	1	TELUR AYAM RAS	-9.9	-0.102
2	ROKOK KRETEK FILTER	3.18	0.0795	2	IKAN GABUS	-8.73	-0.0624
3	DAGING AYAM RAS	3.47	0.0456	3	MELON	-31.29	-0.0618
4	KUE BASAH	4.16	0.03	4	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	-2.64	-0.0422
5	ROKOK KRETEK	2.37	0.0254	5	SEMANGKA	-8.02	-0.0222
6	GULA PASIR	2.64	0.0247	6	TARIP LISTRIK	-0.83	-0.0205
7	BAWANG MERAH	5.7	0.0225	7	WORTEL	-17.22	-0.0184
8	BERAS	0.51	0.0223	8	IKAN KEMBUNG	-4.08	-0.0154
9	CABAI MERAH	25.53	0.022	9	CELANA PANJANG JEANS	-14.35	-0.0146
10	KACANG PANJANG	11.6	0.0181	10	IKAN PAPUYU	-5.71	-0.0134

Selama bulan Maret 2016 dari 10 (sepuluh) komoditas penahan inflasi, komoditas pada kelompok bahan bakar, bahan makanan, dan sandang mempunyai andil yang terbesar. Dari sepuluh pendorong inflasi tersebut, komoditas pada kelompok transport dan bahan makanan mempunyai andil terbesar seperti bensin, sayuran, angkutan udara, beras.

**KOTA BANJARMASIN**  
**PENDORONG DAN PENAHAN INFLASI SELAMA TAHUN 2015**

PENDORONG INFLASI			PENAHAN INFLASI				
	Komoditas	% Perubahan Harga	Andil		Komoditas	% Perubahan Harga	Andil
1	ANGKUTAN UDARA	23.29	0.3804	1	BENSIN	-14.27	-0.5752
2	SEWA RUMAH	5.88	0.3521	2	CABAI MERAH	-67.84	-0.2106
3	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	19	0.2624	3	IKAN GABUS	-11.64	-0.0905
4	ROKOK KRETEK FILTER	10.2	0.24	4	CABAI RAWIT	-48.36	-0.0739
5	BERAS	5.57	0.2371	5	IKAN NILA	-4.63	-0.0329
6	TARIP RUMAH SAKIT	16.44	0.2267	6	IKAN KEMBUNG/GEMBUNG	-7.31	-0.0328
7	IKAN BAKAR	17.7	0.2077	7	SEMANGKA	-11.21	-0.0326
8	MIE	10.04	0.188	8	MINYAK GORENG	-3.12	-0.03
9	DAGING AYAM RAS	12.22	0.166	9	UDANG BASAH	-2.53	-0.0184
10	GULA PASIR	19.97	0.1632	10	CABAI HIJAU	-36.99	-0.0137

4. Sinkronisasi data antara data pusat dan data Provinsi/Kabupaten/Kota serta langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam upaya melakukan sinkronisasi data tersebut :

a. Sinkronisasi data dengan Pemerintah Daerah:

- Pengukuran Produktifitas Padi-Palawija dengan Dinas Pertanian
- Koordinasi dalam rangka Pemutakhiran Basis Data Terpadu dengan PEMPROV/KAB/KOTA dalam memverifikasi Rumah Tangga Sasaran
- Penyiapan data untuk SIPD
- Koordinasi Penyusunan Buku Daerah Dalam Angka
- Koordinasi dengan Badan Kesbangpol dalam rangka penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan pembentukan tim pokja IDI
- Menjadi bagian Tim Monitoring dan Evaluasi pembagian Raskin
- Menjadi bagian Tim Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota
- Mengikuti rapat TPID sebagai narasumber
- Menjadi narasumber dan pokja dalam musrenbangda
- Menjadi bagian Tim Ketahanan Pangan
- Sinkronisasi angka produksi padi-palawija dengan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota setiap empat bulanan (subround)
- Penyampaian Indikator Ekonomi Sosial pada acara Coffee Morning yang diselenggarakan PEMPROV dan dihadiri SKPD

b. Sinkronisasi data dengan Pemerintah Pusat :

- BPS Di Daerah pada dasarnya sebagai pelaksana pengumpulan data atau updating data yang telah ditetapkan oleh BPS RI.
- Dalam pelaksanaan tugas tersebut dilakukan rapat teknis/rapat koordinasi/rapat evaluasi setahun sekali. Untuk tahun 2016 karena ada pengurangan anggaran (self blocking), kegiatan tersebut ditiadakan.

- Untuk hal-hal yang strategis seperti Sensus Ekonomi/PBDDT dilaksanakan RAKORNIS/EVALUASI Pelaksanaan kegiatan tersebut.
  - Sebagai realisasi Perjanjian Kerjasama/MOU/Nota Kesepahaman dengan Kementerian dan Lembaga Negara antara lain:
    - Pelaksanaan Percepatan Pengukuran luas tanam/Panen padi-palawija dengan PUSDATIN Kementan setiap bulan.
    - Pembahasan/rapat koordinasi angka ramalan padi-palawija dengan Dirjen Tanaman Pangan, Kementan setiap empat bulan(subround)
5. a. Persiapan BPS Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan sensus ekonomi Tahun 2016 :
- Persiapan teknis, mencakup:
    - Rekrutmen Petugas
    - Pelatihan Petugas
    - Pendistribusian Dokumen dan Instrumen Perlengkapan Petugas
    - Rapat Koordinasi Teknis dan Administrasi dengan BPS Kabupaten/Kota
  - b. Sosialisasi yang telah dilakukan:
    - Pertemuan
      - Sosialisasi kepada SKPD
      - Seminar untuk para pelaku usaha
      - Pres release bulanan dengan wartawan pada tanggal 1 Desember 2015 dan 1 Maret 2016
    - Pemasangan Baliho dan Spanduk di tempat yang strategis
    - Pemasangan One Way Sensus Ekonomi
    - Parade Kendaraan dengan atribut SE2016
    - Pembagian Leaflet Himbauan Gubernur oleh petugas lapangan
    - Pembagian Tas Plastik berlogo Sensus Ekonomi 2016
    - Apel Siaga diikuti oleh semua petugas Sensus Ekonomi
    - Penayangan Sosialisasi dan Himbauan Gubernur Kalsel
6. Saran dan pandangan dari kantor BPS Kalsel yang akan disampaikan kepada Komisi XI DPR RI demi perbaikan kinerja dan pengawasan mendatang :
- BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik belum optimal dikarenakan masih ada penyelenggara survei belum menyampaikan hasil/sinopsis survei kepada BPS. Dengan semakin banyaknya tuntutan permintaan data dari berbagai pihak, sementara jumlah SDM Kalimantan Selatan yang terbatas (379 orang) kiranya mendapat dukungan dalam penambahan tenaga lapangan.

## **E. KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

1. Perkembangan Makroekonomi, Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Provinsi Kalimantan Selatan (Prov.Kalsel) selama tahun 2015 dan prediksi tahun 2016 :
  - a. Kondisi Makroekonomi



Perekonomian Kalsel tumbuh 4,14% (yoy) pada Triwulan IV-2015, meningkat dibandingkan dengan Triwulan III-2015 yang tumbuh sebesar 3,92% (yoy). Secara keseluruhan tahun 2015 tumbuh sebesar 3,8%, jauh melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya (4,9%). Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh kinerja sektor pertambangan seiring dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan harga batubara sehingga permintaan ekspor menurun. PDRB Kalimantan Selatan pada Triwulan I-2016 diperkirakan tumbuh meningkat dari triwulan sebelumnya yakni pada kisaran 4,1-4,3% (yoy), sejalan dengan membaiknya ekspor batubara dan CPO. Perekonomian Kalimantan Selatan diperkirakan memiliki peluang meningkat pada tahun 2016 yaitu tumbuh pada kisaran 3,9-4,3%.

b. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan hingga akhir tahun 2015 masih belum pulih meskipun pertumbuhan ekonomi mulai membaik. Data terakhir yang dirilis BPS bulan Agustus 2015 menunjukkan terjadinya peningkatan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi sebesar 4,92% dari sebelumnya sebesar 3,80%. Jumlah angkatan kerja dan jumlah orang bekerja masing-masing naik sebesar 45,9 ribu orang dan 22,04 ribu orang dibandingkan pada bulan Agustus 2014. Selain itu jumlah pengangguran juga naik sebesar 23,9 ribu orang dalam kurun waktu tersebut. Hasil *liaison* yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan kepada sejumlah perusahaan di wilayah Kalsel pada Triwulan IV-2015 mengindikasikan turunnya jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian dan pertambangan.

2. Perkembangan inflasi, uang beredar, nilai tukar, dan sistem pembayaran di Provinsi Kalimantan Selatan selama 3 (tiga) tahun terakhir:

a. Inflasi Kalimantan Selatan

Tren Inflasi di Kalimantan Selatan selama tiga tahun terakhir cenderung menurun. Inflasi Kalimantan Selatan pada bulan April 2016 tercatat sebesar 0,03% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,14% (mtm). Secara tahunan inflasi Kalsel hingga bulan April 2016 tercatat sebesar 5,66% (yoy). Rendahnya inflasi pada bulan April 2016 disebabkan oleh deflasi pada komponen *administered prices* dan *volatile foods* seiring dengan penurunan harga BBM, tarif listrik serta penurunan harga bahan makanan seperti daging ayam ras,

telur ayam ras, sejumlah ikan segar, sedangkan inflasi inti cenderung terus persisten.

10 (sepuluh) Komoditas Penyumbang Inflasi Tertinggi				
NO	2013	2014	2015	2016 (s.d. Maret)
1	Bensin	Bensin	Angkutan Udara	Nasi dengan Lauk
2	Beras	Beras	Sewa Rumah	Rokok Kretek Filter
3	Bahan Bakar RT	Tarip Listrik	Bahan Bakar RT	Kue Basah
4	Sop	Mie	Rokok Kretek Filter	Bawang Merah
5	Bawang Merah	Ikan Bakar	Beras	Beras
6	Tarip Listrik	Nasi dengan Lauk	Tarip Rumah Sakit	Sewa Rumah
7	Sewa Rumah	Papan	Ikan Bakar	Pisang
8	Tarip Air Minum PAM	Rokok Kretek Filter	Mie	Baju Kaos Berkerah
9	Rokok Kretek Filter	Martabak	Daging Ayam Ras	Ayam Goreng
10	Ikan Gabus	Ikan Nila	Gula Pasir	Taman Kanak-kanak

#### b. Nilai Tukar

Tren penguatan Rupiah berlanjut, hal ini didorong oleh berlanjutnya aliran modal asing yang masuk dan peningkatan pasokan valuta asing korporasi domestik. Pada bulan Maret 2016, secara *year to date* (ytd), nilai tukar rupiah menguat sebesar 3,96% atau secara *point-to-point* (ptp) menguat sebesar 0,84% (mtm) ke level Rp13.260 per dolar AS. Penguatan Rupiah didorong oleh faktor domestik dan eksternal. Dari sisi domestik, penguatan tersebut didorong oleh perbaikan persepsi terhadap prospek ekonomi dan meningkatnya pasokan valas korporasi domestik yang berorientasi pada ekspor. Dari sisi eksternal, penguatan Rupiah ditopang oleh semakin meredanya risiko di pasar keuangan global dan berlanjutnya pelonggaran kebijakan moneter di beberapa negara maju.

#### c. Data Perbankan di Provinsi Kalimantan Selatan

Kinerja kredit perbankan dan DPK di Provinsi Kalimantan Selatan meningkat pada Triwulan I-2016, hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan Triwulan IV-2015 bersamaan dengan peningkatan DPK pada periode yang sama. Peningkatan kredit bersumber dari kredit modal kerja, khususnya dari sektor pertanian dan PHR. Peningkatan DPK disebabkan oleh naiknya giro Pemerintah akibat Dana transfer awal tahun yang datang lebih cepat dibandingkan tahun lalu.

#### d. Sistem Pembayaran

Perkembangan sistem pembayaran non-tunai dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya tren menurun khususnya di tahun 2015 yang dipengaruhi oleh kondisi perlambatan ekonomi. Sedangkan transaksi kliring mulai meningkat pada triwulan I-2016 dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi yang dimulai pada

Triwulan IV-2015. Transaksi kliring mengalami peningkatan yang signifikan pada triwulan I-2016, tercatat sebesar Rp4,92 triliun tumbuh hingga 23.89% (yoy) dibandingkan dengan Triwulan IV-2015 sebesar Rp4,28triliun. Dari sisi peredaran uang rupiah, aliran transaksi perkasas Bank Indonesia Kalimantan Selatan pada Triwulan I-2016 mengalami *net inflow* sejalan dengan kondisi awal tahun paska peningkatan konsumsi pada akhir tahun dimana masyarakat cenderung kembali menyimpan uang di bank.

3. Prospek perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan dimasa yang akan datang dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat perekonomian:

Perekonomian Kalimantan Selatan pada 2016 diperkirakan pada 3,9%-4,3% (yoy), dilihat dari sisi perkembangan komoditas, harga komoditas utama Kalsel berpeluang sedikit naik pada tahun 2017. Harga CPO dan kayu lapis relatif stabil pada tahun 2016 dan beranjak naik pada tahun 2017, sedangkan harga batubara dan karet masih berisiko turun pada tahun 2016, dan terangkat naik pada tahun 2017. Secara nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan akan terus meningkat hingga mencapai 8% pada tahun 2019 yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

4. Langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam mendukung perekonomian dan mendorong terciptanya stabilitas harga di daerah:

a. TPID Provinsi Kalimantan Selatan menghasilkan program kerja yang disebut 4 Haruan Gambung. Program kerja ini sebagai koridor kerja TPID dalam menjalankan program di lapangan.

b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan memfasilitasi pembentukan klaster produksi pangan dan UMKM. Tujuan dari pembentukan klaster ini adalah untuk mendukung perekonomian masyarakat dengan sasaran binaan adalah komoditas pangan strategis atau penyumbang inflasi (daging sapi, bawang merah dan beras). Pada tahun 2016, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalsel memiliki 5 klaster binaan, yaitu:

- Klaster Bawang Merah (Kab. Tapin)
- Klaster Padi Lokal (Kab. Barito Kuala)
- Klaster Sapi (Kab. Tanah Laut)
- Klaster Padi Lokal dan Unggul (Kab. Tanah Bumbu)
- Klaster Kerajinan Ampulung (Kab. HSU)

Bank Indonesia terus memberikan asistensi dan mengedepankan sinergi dengan pemerintah kabupaten sejak tahun 2013 untuk lebih mengembangkan potensi sapi di Kabupaten Tanah Laut. Selain itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan juga membuat terobosan dengan bekerja sama dengan BPTP Provinsi Kalsel dengan melakukan Uji Adaptasi Varietas Bawang Putih di Lahan Kering dan sukses melakukan panen perdana.

5. Langkah-langkah yang dilakukan Kantor Bank Indonesia dan perbankan Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka peningkatan kualitas dan pemenuhan permintaan uang rupiah sesuai kebutuhan:

a. Pengelolaan Uang Rupiah (Kas Keliling)

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Uang Layak Edar (ULE) di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2015 Bank Indonesia telah melakukan kegiatan kas keliling sebanyak 46 kali dengan total realisasi sebesar Rp52,731 miliar. Kas Keliling ke Daerah Terpencil (*Remote Area*) dilakukan sebanyak 4 kali pada tahun 2015. Kas Keliling Dalam Kota dilakukan di pasar-pasar tradisional dan pasar terapung sebanyak 24 kali pada tahun 2015 dan sebanyak 7 kali pada tahun 2016.

b. Pengelolaan Uang Rupiah (Kas Titipan)

Kas Titipan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait penyediaan uang tunai layak edar. Kas Titipan dimaksudkan untuk melayani kebutuhan likuiditas bank umum di Kab. Tanah Bumbu, Kab. Kotabaru dan Kab. Tanah Laut. Plafond Modal Kerja Kas Titipan sebesar Rp100 milyar. Pada triwulan II-2016, direncanakan membuka kas titipan di Tanjung yang mencakup Kab. Tabalong, Kab. Paringin dan Kab. HSU. Sementara pada tahun 2017 direncanakan membuka kas titipan di Barabai yang mencakup Kabupaten HST, Kabupaten HSS dan Kabupaten Tapin.

6. a. Langkah strategis yang sudah dilakukan Kantor Bank Indonesia Kalimantan Selatan dalam melakukan pengendalian inflasi di Provinsi Kalsel:

- Koordinasi
- Pemantauan Harga
- *Guidance* Pengendalian Inflasi
- Peningkatan Inflasi

b. Kendala-kendala yang dihadapi:

Dalam pelaksanaan tugasnya, TPID Kalimantan Selatan menghadapi beberapa kendala, antara lain kendala infrastruktur energi listrik, pembatalan pembangunan PDR, dan disparitas harga BBM.

- Kondisi Infrastruktur; masih kurangnya daya listrik pada saat beban puncak pukul 6 sore menyebabkan masyarakat harus menambah biaya untuk membeli genset dengan biaya tinggi.
- Pusat Distribusi Regional (PDR) ; Dibatalkannya pembangunan PDR menjadi salah satu kendala, mengingat PDR dapat menjadi penyangga ketika terjadi kekurangan pasokan.
- Disparitas Harga BBM; Mulai 1 April 2016, harga Pertamina di Kalsel dan sekitarnya mencapai Rp8.000,00/liter, lebih tinggi dibandingkan dengan DKI Jakarta dan sekitaran Jawa yang berkisar antara Rp7.550,00 – Rp7.650,00/liter.
- Ikan Haruan; Belum adanya solusi yang bisa secara kuat mampu mengatasi pasokan ikan haruan yang sering menjadi penyumbang inflasi Kalsel.

## **F. OTORITAS JASA KEUANGAN**

### **1. a. Kondisi Bank Umum dan Bank Umum Syariah**

Penyaluran Kredit Bank Umum di Provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar disalurkan pada sektor produktif (modal kerja dan investasi). Kredit bermasalah meningkat, namun masih pada level yang rendah. NPL pada bulan Desember 2015 sebesar 3,1%, sedangkan pada bulan Februari 2016 sebesar 3,7%. Sedangkan KUR meningkat sejak Triwulan III-2015, posisi pada bulan Februari 2016 KUR tumbuh sebesar 49,0% (yoy). Semua indikator Bank Umum Syariah menunjukkan peningkatan dengan rincian sebagai berikut:

Rincian	Growth Desember 2015	Growth Februari 2016
Total Aset	0,71%	17,09%
Pembiayaan	12,09%	12,72%
DPK	2,68%	19,74%

Sebagian besar pembiayaan disalurkan kepada sektor produktif (investasi dan modal kerja) sebesar 62%, sedangkan untuk sektor konsumsi sebesar 38%. NPF pada Bank Umum Syariah cenderung meningkat, NPF pada bulan Desember 2015 sebesar 7,6% meningkat sebesar 9,0% pada bulan Februari 2016. Kenaikan NPF tertinggi terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan, perdagangan besar dan eceran, serta pertambangan dan penggalan.

### **b. Kondisi BPR**

Penyaluran kredit pada BPR di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan sejak Triwulan III-2015 sebesar -4,54%, pada Triwulan IV-2015

sebesar -5,22%, sedangkan pada Februari 2016 sebesar -4,10%. Sedangkan dari sisi NPL cenderung menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar 17,92% pada bulan Desember 2015 meningkat sebesar 20,67% pada bulan Februari 2016.

## 2. Kondisi IKBN di Provinsi Kalimantan Selatan:

IKNB di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 224 jaringan kantor. Pada Asuransi Pertanian realisasi pertanggungannya masih sangat kecil yaitu sebesar 7,42% dari total subsidi Pemerintah untuk 43.000Ha. Sedangkan untuk produk Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), ditinjau dari penerimaan preminya merupakan jenis produk dengan risiko yang tinggi, Namun OJK dan Pemerintah tetap mendorong program ini untuk mewujudkan inklusi keuangan dan menstabilkan kesejahteraan petani,

## 3. Upaya Sosialisasi OJK di Provinsi Kalimantan Selatan :

- Edukasi dan sosialisasi keuangan
- Audiensi kepada *stakeholder*
- Pemanfaatan SIMOLEK (Mobil Edukasi dan Literasi Keuangan)
- Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

## 4. Komunikasi Antar Lembaga

### a. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD):

- OJK bekerjasama dengan Kemendagri dalam mempercepat akses keuangan daerah,
- Menggali dan mengidentifikasi potensi-potensi perekonomian daerah.
- Mengidentifikasi kebutuhan layanan jasa keuangan yang dibutuhkan sehingga dapat dikembangkan potensinya dan mampu menyejahterakan masyarakat.

### b. Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Kalimantan Selatan (LJK Kalsel):

LJK Kalsel merupakan wadah komunikasi dan koordinasi bagi Lembaga Jasa Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan dalam membangun sinergi antar Lembaga Jasa Keuangan dengan *stakeholders*, selain itu juga sebagai penggerak TPKAD.

## G. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

1. Data Bank di Provinsi Kalimantan Selatan yang berada dalam penjaminan LPS (Data per Desember 2015) :

	Kalimantan Selatan	Nasional
<b>Bank Umum</b>		
Konvensional (BPD Kalimantan Selatan)	1	107
Syariah	0	11
<b>Total Bank Umum</b>	<b>1</b>	<b>118</b>
<b>BPR</b>		
Konvensional	25	1.637
Syariah	1	163
<b>Total BPR/BPRS</b>	<b>26</b>	<b>1.800</b>
<b>Total Seluruh Bank</b>	<b>27</b>	<b>1.918</b>

2. Data Jumlah rekening selama 3 (tiga) tahun terakhir :

No	Bank Umum/BPD	Kantor Pusat Provinsi Kalimantan Selatan						Nasional		
		2013		2014		2015		2013	2014	2015
1	Bank Umum / BPD	402.457	0,27%	429.581	0,27%	444.096	0,25%	147.626.510	160.881.757	175.994.476
2	BPR	63.310	0,56%	62.537	0,54%	65.571	0,56%	11.290.952	11.527.424	11.687.171
<b>Total Seluruh Bank</b>		<b>465.767</b>	<b>0,29%</b>	<b>492.118</b>	<b>0,29%</b>	<b>509.667</b>	<b>0,27%</b>	<b>158.917.462</b>	<b>172.409.181</b>	<b>187.681.647</b>

Data jumlah rekening Bank Umum/BPD di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir, pada tahun 2013 sebanyak 402.457 meningkat menjadi 444.096 pada tahun 2015. Demikian juga pada BPR pada tahun 2013 sebanyak 63.310 meningkat menjadi 509.667 pada tahun 2015.

3. Upaya LPS dalam Memelihara dan Menjaga Ketahanan dan Stabilitas Sistem Perbankan Nasional :
  - Sebagai anggota FKSSK yang aktif dalam melakukan asesmen atas kondisi makro dan industri perbankan
  - Penetapan suku bunga penjaminan (*LPS rate*) secara berkala
  - Penyelesaian Bank Gagal Non Sistemik
  - Penanganan 1 Bank Umum (PT. Bank Mutiara, Tbk)

## H. KANWIL KEMENKEU

### 1. Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak

- a. Target dan Realisasi Penerimaan Negara dari sektor pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir di Provinsi Kalimantan Selatan :

Tahun	Rencana	Realisasi	% Capaian	% Pertumbuhan	% Pertumbuhan Target Dari Realisasi
2013	6,074,395	5,150,123	84.78%	4.78%	23.60%
2014	6,026,557	6,139,452	101.87%	19.21%	17.02%

2015	9,567,387	6,637,420	69,38%	8.11%	55.83%
2016(*)	9,799,747	1,605,023	16,38%	-9.96%	47.64%

Tahun 2016\* : Penerimaan pajak sampai dengan 30 April 2016

b. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam memperlancar Penerimaan Negara dari sektor pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir, antara lain :

- Luas wilayah yang luas, terdiri dari 2 (dua) Provinsi (Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah) yang belum bisa diakses dalam waktu yang singkat.
- Jumlah SDM di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang belum signifikan dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak dan cakupan geografis yang harus diawasi.
- Masih banyak WP yang melaksanakan usahanya di Provinsi Kalsel, namun terdaftar dan melakukan penyetoran pajaknya di luar Provinsi Kalsel.
- Penerimaan pajak di Provinsi Kalsel yang berbais pada sektor komoditas (sawit, batubara, dan karet) dan sektor pendukungnya terkena imbas dari jatuhnya harga komoditas tersebut di pasar dunia.
- Kesulitan dalam memperoleh informasi terkait likuiditas Wajib Pajak (WP) yang ada di perbankan dalam pemblokiran dan pembukaan rekening.
- Kesulitan dan keterbatasan dalam memperoleh data pihak ketiga.

c. Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan DJP untuk mencegah kebocoran penerimaan pajak, antara lain :

- Melaksanakan pemantauan pengendalian interen
- Melaksanakan pemantauan pengendalian pengelolaan resiko
- Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
- Merumuskan rekomendasi perbaikan proses bisnis
- Setiap pegawai DJP diperintahkan untuk menandatangani pakta integritas dan mengikuti *Internal Corporate Value* yang diadakan di masing-masing unit kerja.

d. Jumlah WP Badan dan WP Orang Pribadi di Provinsi Kalimantan Selatan dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Keterangan	2016(*)	2015	2014	2013	2012
Badan	42,879	39,489	36,472	33,808	30,263
OP	506,683	465,323	418,259	373,375	307,812
Jumlah	549,562	504,812	454,731	407.183	338,075
% Pertumbuhan	8.86	11.01	11.68	20.44	

e. Langkah-langkah yang ditempuh untuk meningkatkan penerimaan pajak di Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain :



- Meningkatkan kerjasama dengan Instansi, Lembaga, Asosiasi dan pihak lainnya untuk mendukung pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.
- Ekstensifikasi calon Wajib Pajak (WP) berdasarkan data dari Pihak Ketiga dan data dari kegiatan penyisiran di lapangan.
- Edukasi perpajakan dan Peningkatan kompetensi SDM.
- Pembuatan Profil WP untuk pengawasan, Pemanggilan WP untuk klarifikasi data pelaporan serta melakukan konseling dan penagihan terhadap WP.
- Penggalan potensi UKM melalui kerjasama dengan Dinas terkait.
- *Law Enforcement*, Pelaksanaan penagihan aktif, dan Mempermudah penyetoran pajak melalui kerjasama dengan Bank.

## 2. Perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

- a. Target dan Realisasi Penerimaan Negara dari Sektor Bea dan Cukai selama 3 (tiga) tahun terakhir :

Tahun	Total Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2013	170.416.775.100	213.050.324.219	125,02%
2014	217.806.789.770	44.737.496.453	20,54%
2015	71.913.304.908	79.756.480.634	110,91%
2016 (s/d April)	15.675.462.246	4.820.020.662	30,75%

Saat ini jumlah Importir yang tercatat di Kalsel sebanyak 10 Perusahaan, tetapi tidak semuanya melakukan impor secara rutin. Jumlah eksportir yang tercatat sebanyak 10 eksportir, yang terdiri dari eksportir batubara, karet, veneer, plywood dan zircon.

- b. Faktor-faktor yang menghambat Penerimaan Negara :

- Tidak ada kapal maupun pesawat yang langsung dari Luar Negeri ke Kalimantan Selatan sehingga Penerimaan impor hanya bersifat insidental sesuai kebutuhan perusahaan.
- Tidak ada lagi impor alat berat maupun infrastruktur untuk pembukaan tambang baru.
- Diberlakukannya penghapusan Bea CPO
- Banyaknya importir yang memanfaatkan fasilitas pembebasan melalui BKPM maupun *Preferential Tarif* (Asean Free Trade Area, dll).

- c. Kinerja Pengawasan Barang Kena Bea Cukai (*prevetif* dan *repressif*) yang telah dilakukan oleh DJBC Provinsi Kalsel:

- Kegiatan *Preferentif* :

- Melakukan monitoring pasar dan penyuluhan langsung di tempat penjualan eceran dan penyebaran brosur mengenai larangan penjualan produk Hasil Tembakau (HT) yang ilegal di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
- Melaksanakan sosialisasi dengan mengundang pengusaha THM dan Hotel yang melakukan penjualan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
- Mengadakan rapat koordinasi lintas wilayah antara Kanwil DJBC Kalbagtim dengan Kanwil daerah produksi Hasil Tembakau (Kanwil Jatim I dan Kanwil Jatim II) untuk mengaktifkan pertukaran data peredaran HT, khususnya yang ilegal.
- Kegiatan *Represif*:
  - Melakukan operasi penindakan terhadap pengiriman HT ilegal yang masuk ke wilayah Kalsel selama 2 (dua) tahun terakhir.

d. Langkah –langkah yang dilakukan dalam upaya memperlancar dan meningkatkan penerimaan bea dan cukai antara lain:

- Melakukan sosialisasi kepada *stakeholder* tentang potensi dan fasilitas yang dapat diberikan oleh Bea dan Cukai antara lain Pusat Logistik Berikat, Impor dan Ekspor Berkala, Mitra Utama, dll.
- Menyediakan Pusat Layanan Terpadu
- Melakukan Pengawasan Melekat dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas kepada semua pegawai
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

### 3. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

a. Pagu dan Realisasi Belanja DIPA Provinsi Kalimantan Selatan :

Tahun	Pagu	Realisasi	% Real	% Target
2013	6,528,143.17	6,080,392.90	93.14	90
2014	6,853,662.45	6,029,017.72	87.97	90
2015	8,615,794.92	7,580,037.38	87.98	90
2016*)	8,041,978.67	1,487,359.85	18.49	90

\*) Kondisi realisasi s.d. 29 April 2016

Sejak tahun 2013 hingga 2015 capaian realisasi setiap tahunnya rata-rata sebesar 89,70%, dalam kurun waktu 3 tahun tersebut capaian realisasi terendah di tahun 2014. Kondisi capaian realisasi belanja APBN pada Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu 3 tahun selalu berada diatas rata-rata nasional.

b. Faktor-faktor yang menghambat Penerimaan Negara :

- Keterlambatan penerbitan atau belum diterimanya DIPA Satker, serta
- Lemahnya perencanaan program dan kegiatanpetunjuk teknis kegiatan
- Blokir anggaran yang diakibatkan belum dilengkapinya persyaratan
- Adanya perubahan penggunaan kode akun untuk belanja bansos ke belanja barang
- Adanya kesalahan pencantuman daftar supplier sehingga tagihan ditolak KPPN
- Proses pengumpulan dan verifikasi data penerima pembayaran memerlukan waktu yang panjang
- Proses teknis dan administratif pengadaan yang membutuhkan waktu relatif lama dan adanya keterbatasan SDM
- Perencanaan kegiatan dan pembayaran sebagian besar dilaksanakan di semester II
- Faktor iklim sehingga terjadi penndaan pelaksanaan kegiatan

c. Langkah strategis yang dilakukan :

- Penyempurnaan regulasi
- Penguatan hubungan kelembagaab dengan K/L satker
- Penyempurnaan monev pelaksanaan anggaran dengan menggunakan indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebagai parameter keberhasilan
- Pembangunan fungsi Sistem Informasi Terpadu Satuan Kerja dan Kementerian Negara / Lembaga (SINTESA) yang berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian permasalahan pelaksanaan anggaran K/L satker oleh KPPN.

## I. PERUM JAMKRINDO

1. Kinerja operasional selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir serta proyeksi pada Tahun 2016 baik konvensional maupun syariah:

Tahun	Pokok Kredit (*)	IJP (*)	Klaim (*)	NPG	Rasio Klaim
a	b	c	d	e =d/b	f =d/c
<b>Konvensional</b>					
2013	41.389	1.463	921	2,23%	62,95%
2014	38.627	1.565	985	2,55%	62,94%
2015	63.826	1.472	902	1,41%	61,28%
Proyeksi 2016	113.000	1.959	1.203	1,06%	61,41%

**Syariah**

2013	3.894	138	42	1,08%	30,46%
2014	2.156	121	36	1,67%	29,68%
2015	1.693	91	20	1,18%	21,98%
Proyeksi 2016	9.500	111	42	0,44%	37,84%

**Korporat**

2013	45.283	1.601	963	2,13%	60,15%
2014	40.783	1.689	1.021	2,50%	60,55%
2015	65.519	1.563	922	1,41%	58,99%
Proyeksi 2016	122.500	2.070	1.245	1,02%	60,14%

(\*) dalam milyar rupiah

## 2. Besar penjaminan KUR di Provinsi Kalimantan Selatan :

Uraian	Tahun								
	2013			2014			2015		
	Volume*	UMKMK	Tenaga Kerja	Volume*	UMKMK	Tenaga Kerja	Volume*	UMKMK	Tenaga Kerja
Konvensional	663.646	37.164	44.810	748.308	34.627	40.494	244.744	11.138	13.965
Syariah	22.116	121	173	23.462	116	165	50	1	1
Total	685.762	37.285	44.983	771.770	34.743	40.659	244.794	11.137	13.966

dalam jutaan rupiah

## 3. Permasalahan KUR :

- Masyarakat masih beranggapan bahwa kredit program merupakan dana hibah dari Pemerintah
- Keterbatasan pengalaman UMKM dalam menjalankan usahanya dan kemampuan manajemen.

## 4. Upaya Pembinaan yang dilakukan agar program KUR berjalan dengan baik dan menghindari adanya kredit KUR yang macet:

- Melakukan sosialisasi mengenai ketentuan KUR ke bank-bank pelaksana KUR maupun LKBB yang akan menjadi pelaksana KUR.
- Melakukan sosialisasi ketentuan KUR kepada UMKM bersama-sama dengan Kementerian terkait yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

## J. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)

### 1. Kinerja Keuangan Bank Rakyat Indonesia selama kurun waktu 3 tahun terakhir dan proyeksinya :

KETERANGAN	POSISI				
	2013	2014	2015	Maret 2016	Proyeksi Desember 2016
SIMPANAN	7,155	7,506	8,305	7,806	9,008
PINJAMAN	4,862	5,381	5,970	6,325	6,873
NPL	61	93	98	123	182
% NPL	1.3%	1.8%	1.6%	1.9%	2.7%
LABA/RUGI	501	530	559	136	569

Kinerja keuangan BRI di Provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun. Pinjaman tahun 2016 diproyeksikan dapat tumbuh sebesar 15,12%, sedangkan Laba di tahun 2016 diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 1,71%.

Dana Pihak Ketiga Tahun 2016 diproyeksikan dapat tumbuh sebesar 8,47%. Komposisi Dana Pihak Ketiga di BRI Provinsi Kalimantan Selatan didominasi Giro dan Tabungan sebesar 81%. Pada bulan Maret 2016 Aset di BRI Provinsi Kalsel mengalami penurunan disebabkan karena pembentukan cadangan kerugian akibat meningkatnya NPL. Sedangkan komposisi Pinjaman didominasi Kredit Modal Kerja sebesar 49,74%. Penyaluran kredit untuk UMKM sebagian besar disalurkan pada sektor perdagangan sebesar 64,34%, pertanian 15,83%, dan transportasi sebesar 3,2%. NPL tertinggi berada pada sektor pertambangan sebesar 22,31% dari total *outstanding* pada sektor tersebut, hal tersebut diakibatkan karena menurunnya harga komoditi tambang belakangan ini.

## 2. Permasalahan Perbankan di Provinsi Kalimantan Selatan :

- Penurunan harga komoditas batubara, minyak bumi, kelapa sawit dan karet di Provinsi Kalimantan Selatan
- Meningkatnya NPL serta banyaknya PHK Karyawan
- Luas wilayah Kalsel menyebabkan beberapa wilayah tertentu belum terlayani operasional perbankan.

Upaya yang sudah dilakukan:

- Melakukan monitoring dan pembinaan kepada debitur secara berkala
- Penyelamatan kredit bermasalah dalam bentuk restrukturisasi pinjaman
- Memperluas jaringan kerja perbankan secara konsisten

## 3. KUR di Provinsi Kalimantan Selatan

### a. Penyaluran KUR menurut karakteristik Nasabah KUR

Keterangan	Desember 2013	Desember 2014	Desember 2015	Maret 2016
	Outstanding	Outstanding	Outstanding	Outstanding
KUR Ritel	221,328	229,705	203,515	288,273
KUR Mikro	402,025	421,726	375,867	611,380
KUR TOTAL	623,353	651,431	579,382	899,653

Karakteristik nasabah KUR BRI di Provinsi Kalimantan Selatan adalah Nasabah Perorangan, sedangkan posisi NPL KUR pada bulan Maret 2016 terjaga di 1,15% sesuai ketentuan Bank Indonesia dibawah 5%.

- b. Kendala yang dihadapi dalam penyaluran KUR:
- Adanya ketentuan Pemerintah bahwa untuk peminjam diatas Rp50 juta harus memiliki NPWP, sedangkan pada umumnya nasabah yang bergerak di sektor informal dan pertanian biasanya belum memiliki NPWP.
  - Banyak petani sawit memerlukan pembiayaan KUR dengan jangka waktu yang lebih panjang diatas ketentuan KUR saat ini.
- c. Saran yang diberikan :
- Agar pelaku usaha mikro dan petani yang ingin memperoleh KUR sampai dengan jumlah tertentu (misalnya Rp200 juta) agar dibebaskan dari syarat memiliki NPWP.

### **III. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan ke IV Komisi XI DPR ke Provinsi Kalimantan Selatan. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh di dalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam Rapat-rapat Komisi XI DPR RI.

**Jakarta, Mei 2016**

**Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI**

**Ketua**

**Ir. H. Ahmadi Noor Supit**

**A. 304**